

# PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI JAMBI

*The Effect of Human Development Index on Regional Inequality in Jambi Province*

Vinni Aprilianti<sup>1</sup>, Asti Harken<sup>2</sup>

Vinnia80@gmail.com; asti.harken@gmail.com

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi<sup>1,2</sup>

Diterima : 03 Juni 2021; Direvisi: 02 Juli 2021; Disetujui : 31 Agustus 2021

DOI : <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.111>

## **Abstract**

*The Human Development Index (HDI) is an indicator of the quality of regional development by measuring people's welfare from the dimensions of income, education and health. Each policy choice taken by a region will affect the results of regional development. The main problem that becomes the starting point of this research is the influence of HDI values on regional inequality between regions in districts/cities within Jambi Province. The condition of inequality between regions is measured using the Williamson Index. The purpose of this study is to determine the effect of HDI on regional inequality in Jambi Province. The research uses a quantitative approach with statistical analysis of panel data regression with the PCSE method with STATA program application. The data used is secondary data in the form of regional inequality, HDI data, constant price GRDP and government size in 11 districts/cities in Jambi Province from 2013 to 2017. The results of the analysis using panel data regression are obtained, namely an increase in HDI will reduce regional inequality, while an increase in GRDP and government size affects the increase in regional inequality.*

**Keywords:** HDI; Regional Inequality; Government Size; PCSE

## **Abstrak**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kualitas pembangunan daerah dengan mengukur kesejahteraan masyarakat dari dimensi pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Setiap pilihan kebijakan yang diambil suatu daerah akan mempengaruhi hasil pembangunan daerah tersebut. Masalah pokok yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah pengaruh nilai IPM terhadap ketimpangan wilayah antar daerah di Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi. Kondisi ketimpangan antar wilayah diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik regresi data panel dengan metode PCSE menggunakan aplikasi program STATA. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data Ketimpangan wilayah, IPM, PDRB harga konstan dan *government size* pada 11 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Jambi sejak tahun 2013 sampai 2017. Hasil analisa menggunakan regresi data panel diperoleh yaitu peningkatan IPM akan mereduksi ketimpangan wilayah, sedangkan peningkatan PDRB dan *government size* mempengaruhi peningkatan ketimpangan wilayah.

**Kata Kunci:** IPM; Ketimpangan Wilayah; Government Size; PCSE;

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di daerah-daerah dengan cara seluas-luasnya meski peningkatan kesejahteraan menghadapi banyak sekali tantangan. Masalah yang sering muncul di daerah/wilayah adalah masalah ketimpangan pembangunan ekonomi dan kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Menurut Williamson (1965), ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. Secara Vertikal perbedaan pada distribusi pendapatan, serta secara horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 1997). Ukuran penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah atau daerah antara lain adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan alat ukur untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia, dampak kinerja pembangunan (Melliana et al, 2013), serta menjadi instrumen kebijakan bagi pemerintah (Spangenberg, J,H, 2015). Capaian nilai IPM menjadi tolak ukur pembangunan masyarakat, dengan terpenuhinya capaian IPM maka aspek

pembangunan manusia lainnya akan bisa terwujud.

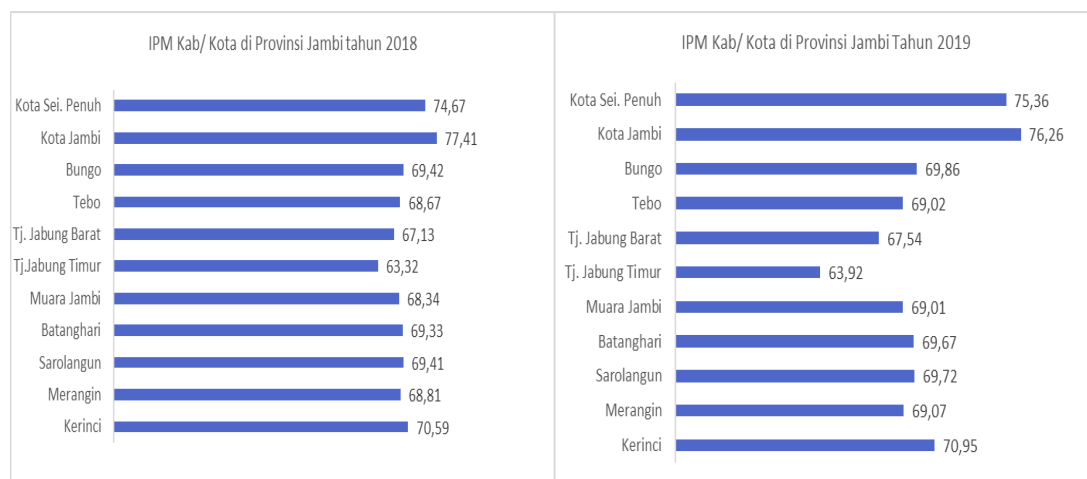
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu dimensi pendapatan, pendidikan dan kesehatan (BPS, 2015). IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) tahun 1990. *Human Development Report* (HDR). UNDP merupakan organisasi multilateral besar yang memberi bantuan teknis dan pembangunan di seluruh dunia. Data UNDP memperlihatkan nilai IPM Indonesia pada tahun 2019 yaitu 71,8 berada di rangking 107. Negara dengan nilai IPM tertinggi berdasarkan data *Human Development Index* (HDI) UNDP tahun 2020 adalah Norwegia yaitu 95,7. Kondisi ideal Norwegia tentu akan menjadi indikator dan tolak ukur maksimal bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan manusia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 (BPS, 2020), provinsi yang mempunyai nilai IPM tertinggi di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu 80,7. Pembangunan manusia di DKI Jakarta tentu akan menjadi rujukan bagi pembangunan di daerah lainnya

terutama Provinsi Jambi. Hasil IPM DKI Jakarta menggambarkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jambi pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu tumbuh 0,86%, dengan nilai IPM tahun 2019 adalah 71,26, sementara nilai IPM tahun 2018 adalah 70,65. Namun IPM Provinsi Jambi tahun 2019 masih dibawah nilai IPM Indonesia yaitu 71,92 (BPS, 2019). Apabila dilihat Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi

Jambi, nilai IPM Provinsi Jambi tidak menggambarkan nilai IPM yang baik untuk keseluruhan daerah disana. Beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi memiliki nilai IPM yang rendah yaitu dibawah 70 seperti terlihat di Gambar 1. Meskipun demikian IPM Provinsi Jambi telah mengalami kenaikan, akan tetapi tingkat kenaikan yang dicapai belum cukup signifikan. Oleh sebab itu, penting dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami berbagai masalah yang mempengaruhi peningkatan nilai IPM di Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Jambi.



**Gambar.1** Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018- 2019

Sumber : (BPS, 2019)

Nilai IPM suatu wilayah menggambarkan seperti apa pilihan kebijakan telah di ambil dan dilaksanakan terhadap wilayah tersebut. Pilihan kebijakan

pembangunan yang digunakan oleh pemerintah mempengaruhi nilai IPM dan juga ketimpangan antar kabupaten/kota disuatu negara atau wilayah. Adapun kondisi ketimpangan

antar wilayah misal Kabupaten dan Kota diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Ketimpangan wilayah memiliki dampak positif yaitu mendorong wilayah yang kurang maju sehingga dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhan wilayahnya agar tercapai kesejahteraan. Sedangkan dampak

negatif dari ketimpangan wilayah yaitu menyebabkan inefisiensi dalam bidang ekonomi, stabilitas sosial menjadi lemah dan tingginya ketimpangan menyebabkan ketidakadilan. Nilai ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dilihat pada Tabel 1. berikut :

**Tabel 1.** Indeks Williamson Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017

DAERAH	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Provinsi Jambi</i>	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
Kab. Batang Hari	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Bungo	0,15	0,07	0,07	0,07	0,07
Kerinci	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
Merangin	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14
Muaro Jambi	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Sarolangun	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05
Tanjung Jabung Barat	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32
Tanjung Jabung Timur	0,25	0,24	0,23	0,21	0,22
Tebo	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Kota Jambi	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
Kota Sungai Penuh	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02

**Sumber :** Data diolah, 2021

	= Nilai tertinggi
	= Nilai terendah

Berdasarkan Tabel 1. Kabupaten Batanghari mengalami ketimpangan terendah sepanjang periode penelitian dengan Indeks Williamson sebesar 0,1. Kota Sungai Penuh juga mengalami ketimpangan terendah pada Tahun 2013 dan 2014 dengan Indeks Williamson sebesar 0,1. Provinsi Jambi

selama periode penelitian mengalami ketimpangan tertinggi pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 dengan Indeks Williamson sebesar 0,12. Kontributor terbesar terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Jambi sepanjang periode penelitian adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki

Indeks Williamson sebesar 0,32 sampai dengan 0,36. Penghitungan Indeks Williamson menggunakan data PDRB dan juga jumlah penduduk. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki Indeks Williamson tertinggi di Provinsi Jambi karena PDRB nya yang jauh diatas rata-rata PDRB kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian Hardiani dan Junaidi (2011) mengenai kualitas pendidikan penduduk diperoleh bahwa pendidikan di Provinsi Jambi relatif lebih rendah, tetapi derajat kesehatan lebih baik. Dalam hal kemiskinan, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 provinsi di Sumatera memiliki indeks ketimpangan yang lebih besar dari rata-rata 5 provinsi lainnya di Sumatera.

### **RUMUSAN MASALAH**

Beberapa wilayah yang memiliki PDRB yang sama belum tentu menghasilkan pembangunan manusia yang sama. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh IPM terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang timbul, yaitu

relatif lebih rendah dengan kecenderungan penurunan yang relatif tinggi. Penelitian Budiantara and Sugiantari (2013) menjelaskan tentang jumlah kematian bayi mempengaruhi angka harapan hidup dimana angka kematian bayi naik sebesar satu satuan maka angka harapan hidup cenderung turun sebesar 0,2355 tahun dengan asumsi variabel lain konstan. Penelitian Sebayang (2016) menganalisis ketimpangan yang terjadi antar Provinsi di Sumatera Tahun 2011 - 2015. Penelitian menggunakan metode analisis Tipologi Klassen, Indeks Williamson

bagaimanakah pengaruh IPM terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi periode 2013 sampai dengan 2017?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi periode Tahun 2013 sampai dengan 2017.

### **Hipotesis Penelitian :**

Berdasarkan teori yang ada serta kajian empirik, maka hipotesis yang

merupakan jawaban sementara pada penelitian ini adalah:

Diduga IPM dapat mereduksi ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi serta Pemerintah Provinsi Jambi dalam Menyusun kebijakan dan program kerja terkait pembangunan guna mereduksi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jambi.

## **LANDASAN TEORI**

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut United Nation Development Programme (UNDP), pembangunan manusia dititikberatkan pada persoalan perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Konsep pembangunan manusia memiliki perbedaan dengan konsep pembangunan klasik yang fokus utamanya adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin tercapainya tujuan konsep pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan. Secara ringkas empat hal

pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

Konsep sumber daya manusia lainnya adalah teori Human Capital. Menurut (Frank, R. H., & Bernanke (2007), human capital adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia. Todaro (2000) menjelaskan bahwa human capital dapat diukur melalui bidang kesehatan dan pendidikan. Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah seorang manusia. Oleh karena itu, penyediaan pendidikan formal dipandang sebagai investasi modal manusia yang di anggap sama atau bahkan lebih berharga dari pada investasi modal fisik (Woodhall.M. Psacharopoulos. G, 1985)

Amartya Sen dalam bukunya *Development as Freedom* (Sen, 1999) menjelaskan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kebebasan yang dimaksud oleh Sen yaitu kebebasan dimana masyarakat dapat merasakan sejahtera sebagai hasil dari capaian pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia disuatu wilayah, yang dihitung melalui perbandingan dari angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia oleh UNDP dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Very high HDI: untuk nilai IPM  $\geq 0.800$
- b. High HDI:  $0.700 \leq$  nilai IPM  $< 0.800$
- c. Medium HDI:  $0.550 \leq$  nilai IPM  $< 0.700$
- d. Low HDI: nilai IPM  $< 0.550$ .

### **Ketimpangan Wilayah**

Definisi dari ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara horizontal dan vertikal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan (*disparitas*). Jeffrey G. Williamson (1965) menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan

sedang berkembang dengan mencoba meneliti hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dengan disparitas regional. Ditemukan bahwa *disparitas regional* akan lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu pada tahap awal pembangunan (Williamson, 1965). Pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih “matang” akan terjadi keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Williamson menggunakan *Williamson Index* (Indeks Williamson) untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah bukan tingkat kesejahteraan antar kelompok. Formulasi Indeks Williamson secara statistik adalah sebagai berikut :

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \cdot \frac{f_i}{f}}}{\bar{Y}} \quad 0 < CV_w < 1 \dots (1)$$

Keterangan:

$CV_w$  : Indeks Wiliamson

$f_i$  : Jumlah penduduk di wilayah yuridis ke-i yang lebih rendah (kabupaten/ kota atau

- /provinsi) (jiwa)
- $f$  : Jumlah penduduk seluruh wilayah yuridis yang lebih tinggi (provinsi atau nasional) (jiwa)
- $Y_i$  : PDRB per kapita di wilayah yuridis ke- $i$  yang lebih rendah (kabupaten/ kota atau provinsi) (rupiah)
- $\bar{Y}$  : PDRB per kapita rata-rata wilayah yuridis yang lebih tinggi (provinsi atau nasional) (rupiah)

Ketimpangan semakin kecil atau semakin merata jika Indeks Williamson semakin kecil atau mendekati nol dan sebaliknya ketimpangan semakin melebar jika indeks Williamson semakin besar mendekati angka 1 (satu). Walaupun indeks ini memiliki kelemahan yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan artinya apabila ukuran wilayah yang digunakan berbeda maka akan berpengaruh terhadap hasil perhitungannya, namun cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan wilayah dapat

diketahui dengan menggunakan penghitungan indeks williamson yang meneliti hubungan ketimpangan regional dan pendapatan per kapita masyarakat. Menurut Sjafrizal (1997), faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah (1) Perbedaan kandungan sumber daya alam, (2) Perbedaan kondisi geografis, (3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, (4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, (5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Variabel Logaritma PDRB atas harga konstan digunakan untuk meng*capture* pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Keputusan ini diambil merujuk pada penelitian Rahmayanti and Theara (2010) serta Alexiou (2009). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara dan timbul akibat aktivitas ekonomi suatu negara pada periode waktu tertentu (BPS, 2018). Adapun kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel 3. berikut :



**Tabel 2.** PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 (dalam Milyar Rupiah)

DAERAH	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Provinsi Jambi</i>	108.386	119.300	124.513	130.419	136.622
Kab. Batang Hari	8.641	9.298	9.695	10.136	10.624
Kab. Bungo	6.199	9.830	10.334	10.871	11.487
Kab. Kerinci	4.419	4.811	5.120	5.463	5.792
Kab. Merangin	7.110	7.583	7.993	8.490	8.961
Kab. Muaro Jambi	11.639	12.578	13.238	13.956	14.662
Kab. Sarolangun	8.268	8.675	8.987	9.369	9.809
Kab. Tanjabbar	23.085	24.552	25.446	26.245	27.362
Kab. Tanjabtim	14.678	15.550	15.841	16.258	16.766
Kab. Tebo	7.243	7.881	8.303	8.747	9.237
Kota Jambi	13.906	15.080	15.852	16.936	17.728
Kota Sungai Penuh	3.199	3.461	3.705	3.946	4.193

**Sumber :** Provinsi Jambi serta Kabupaten/Kota dalam Angka Tahun 2014-2018

	= Nilai tertinggi
	= Nilai terendah

Berdasarkan Tabel 3, selama 5 (lima) tahun periode penelitian, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki PDRB atas harga konstan tertinggi sepanjang periode penelitian, sedangkan Kota Sungai Penuh menjadi kabupaten dengan PDRB atas harga konstan terendah di Provinsi Jambi sepanjang periode penelitian. Bila dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi selalu berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi Provinsi Jambi terjadi tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan 7,76. Kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Kerinci

dengan tingkat pertumbuhan 9,06. Tingkat pertumbuhan ekonomi terendah dialami Kabupaten Sarolangun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,2. Tingkat pertumbuhan ekonomi terendah Provinsi Jambi terjadi Tahun 2015, dengan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,21 dimana Kota Sungai Penuh sebagai kontributor tertinggi sebesar 7,06. Kontribusi terendah diberikan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni hanya sebesar 1,81. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami Pertumbuhan ekonomi terendah selama 4 (empat) tahun selama periode penelitian.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Mardiasmo, 2002) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang didapat dari berbagai sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu variabel kontrol yang digunakan pada penelitian

ini. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurhuda, et al (2013) yang menggunakan PAD sebagai salah satu variabel kontrol dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun data jumlah pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

**Tabel. 3.** Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017

KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Batang Hari	50.623.238.098	70.809.104.649	68.925.708.044	73.516.765.630	87.929.338.843
Kab. Bungo	80.201.122.275	107.019.908.939	105.277.046.266	123.173.598.838	188.923.529.845
Kab. Kerinci	6.444.631.039	55.550.777.966	70.462.409.629	80.850.837.270	85.760.743.969
Kab. Merangin	44.396.136.300	67.200.333.089	76.949.402.914	78.509.973.898	90.019.990.354
Muaro Jambi	48.531.323.405	61.631.058.802	63.662.790.891	59.100.025.288	79.336.066.513
Kab. Sarolangun	31.307.607.303	85.372.961.961	77.734.794.414	92.425.177.747	85.185.129.614
Kab. Tanjab Barat	54.642.059.146	73.098.923.519	68.040.011.773	85.904.327.488	99.234.814.908
Kab. Tanjab Timur	29.812.142.172	34.687.282.552	38.473.606.893	43.935.743.484	76.775.700.726
Kab. Tebo	27.697.180.351	56.485.780.302	62.037.299.487	60.938.006.779	68.406.126.028
Kota Jambi	149.041.969.818	246.427.699.826	263.925.520.119	287.525.214.004	397.327.847.289
Kota Sungai Penuh	24.266.664.871	33.199.858.218	36.246.931.834	36.632.576.994	31.420.979.313

**Sumber :** BPK Regional Jambi 2013-2017.



= Nilai tertinggi

= Nilai terendah

Berdasarkan Tabel, Kota Jambi memiliki Jumlah Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Provinsi Jambi selama periode penelitian sedangkan

Kota Kerinci memiliki jumlah Pendapatan Asli Daerah terendah sepanjang periode penelitian.

## METODOLOGI PENELITIAN

Analisa data panel mengacu pada data yang mengandung seri waktu untuk penampang melintang atau sekelompok orang yang disurvei secara berkala selama jangka waktu tertentu. Pengamatan data panel meliputi dua dimensi yaitu dimensi *cross sectional* dan dimensi *time series*. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yang terdiri dari:

1. Studi yang bersumber dari jurnal-jurnal yang mendukung serta kajian-kajian literatur.
2. Data IPM dari 11 (sebelas) kabupaten/kota serta Provinsi Jambi periode Tahun 2013-2017 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Variabel terikat penelitian ini adalah ketimpangan wilayah dengan menggunakan Indeks Williamson (IW), sedangkan variabel bebas adalah IPM, PDRB dan PAD, akan tetapi PDRB dan PAD merupakan variabel kontrol untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan wilayah. Variabel terikat adalah variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas

(variabel X). Variabel bebas adalah variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka (diduga) akan dapat berubah dalam keragamannya. Variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dikendalikan atau dibuat konstan sebagai usaha untuk menguragiserta menghilangkan pengaruh lain selain variabel bebas yang dimungkinkan mempengaruhi hasil variabel terikat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif dan pendekatan verifikatif. Menurut Moch. Nazir (2011) metode deskriptif adalah studi yang berusaha untuk menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok dan individu serta studi untuk mengukur frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas yang berguna untuk menentukan fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat. Metode deskripsi digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian secara *independent*. Moch. Nazir (2011) menyatakan bahwa, "Metode penelitian verifikatif

adalah metode penelitian yang berusaha untuk melakukan perhitungan statistik sehingga dapat dihasilkan pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima dengan tujuan untuk

mengetahui hubungan kausalitas antar variabel". Pengujian kebenaran dari suatu hipotesis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan merupakan dasar metode penelitian verifikatif.

**Tabel 4.** Operasionalisasi Variabel-Variabel

Variabel	Data	Definisi	Ukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5
IW	Ketimpangan Ekonomi	Nilai Indeks Williamson	Indeks	Data diolah
LPDRB	Logaritma PDRB	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) real atas dasar harga konstan per tahun yang digunakan untuk mengcapture pertumbuhan ekonomi	logaritma	BPS
IPM	IPM	Capaian nilai IPM menjadi tolak ukur pembangunan masyarakat	Persen	BPS
LPAD	PAD	Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah	logaritma	Diolah

**Sumber :** Hasil studi empiris

Penelitian ini menggunakan metode *Ordinari Least Square* (OLS) dengan *Fixed Effect Model* menjadi pilihan model terbaik. Metode Ordinary Least Squares (OLS) merupakan metode yang sering digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi. Namun, setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka pada model mengalami heteroskedastisitas dan autokorelasi. Bila terjadi gangguan heteroskedastisitas dan autokorelasi pada model maka dapat diperbaiki dengan menggunakan:

1. FGLS (*Feast Generalized Least Square*), jika jumlah tahun (*time*

*series*) lebih besar daripada jumlah sampel ( $T > N$ )

2. PCSE (*Panel Corrected Standart Error*), jika jumlah sampel lebih besar daripada jumlah tahun ( $T < N$ ).

Penelitian ini menggunakan PCSE, karena jumlah sampel yang digunakan lebih banyak daripada jumlah periode penelitian. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 11 (sebelas) kabupaten kota dengan periode penelitian selama 5 (lima) tahun. PCSEs merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, autokorelasi dan ketergantungan *cross sectional* pada

data panel. PCSE menggunakan OLS untuk menghasilkan estimasi koefisien, tetapi menggunakan matriks kovarian yang diperkirakan untuk menghitung standar error, Beck and Katz (1995) menemukan bahwa pendekatan ini menghasilkan standar error yang dapat diandalkan serta kuadrat rata-rata standar error yang relatif rendah. Ditambahkan Wibowo (2003) metode OLS-PCSE tidak mengubah poin koefisien estimasi dan hasil utama. Hanya standar error dan penyesuaian r-rasio yang berubah.

$$IW_{it} = \alpha + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 LPDRB_{it} + \beta_3 LPAD_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- IW : Ketimpangan wilayah yang merupakan hasil penghitungan Indeks Williamson
- IPM : Indeks Pembangunan Manusia
- LPDRB : Logaritma PDRB
- LPAD : Logaritma PAD
- i* : Kabupaten –*i* pada tahun –*t*
- $\mu_{it}$  : Error di Kabupaten/Kota *i* pada tahun *t*
- $\alpha$  : *Intersep*
- $\beta_{1-3}$  : Koefisien regresi

### HASIL PENELITIAN

Penentuan model terbaik untuk digunakan untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan wilayah. Uji Chow dilakukan untuk menguji apakah model *Common effect* atau model *Fixed effect* yang paling tepat

digunakan, sedangkan Uji Hausman digunakan untuk memilih apakah model Random Effect atau model Fixed Effect yang paling tepat digunakan dalam analisis regresi data. Hasil dari Uji hausman dan Uji Chow dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5.** Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Uji	Prob>chi2	Prob>F
Chow		0,00
Hausman	0,00	

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Stata 13, didapat hasil sebagaimana Tabel 5. Hasil Uji Chow nilai Prob>F sebesar 0,00<0,05 sehingga model terbaik adalah model *fixed effect*. Kemudian dilakukan uji hausman dengan hasil Prob>Chi2 sebesar 0,00<0,05 sehingga model yang paling tepat adalah model *Fixed Effect*.

Secara teoritis agar model regresi yang dibangun memenuhi prinsip BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*) maka model harus memenuhi asumsi-asumsi yang telah ditetapkan, sehingga serangkaian uji perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa model terbebas dari semua masalah yang bisa mengakibatkan

model tidak BLUE. Penelitian ini menggunakan model *Fixed effect* dengan data panel, sesuai ketentuan maka uji yang dilakukan hanya uji Autokorelasi, heteroskedastisitas dan Multikolinearitas.

Variabel bebas yang digunakan didalam sebuah model tidak boleh memiliki korelasi yang kuat karena akan berdampak pada keakuratan dalam pendugaan parameter yakni koefisien regresi dan juga variabel bebas (*independent*) menjadi tidak signifikan. Menurut Chatterjee, et.all (2012) bila variabel-variabel bebas memiliki korelasi yang kuat akan menjadikan interpretasi koefisien regresi menjadi tidak benar lagi. Namun bukan berarti tidak diperbolehkan sama sekali, yang tidak boleh jika terbentuk kolinearitas sempurna (*perfect colinearity*).

Menurut Winarno (2015), masalah multikolinearitas dapat diabaikan karena estimatornya masih dapat bersifat BLUE. Adanya korelasi antar variabel independent tidak mempengaruhi sifat BLUE model sepanjang variabel independent signifikan, tanda (*sign*) dari koefisiennya sesuai dengan teori ekonomi atau kondisi empiris.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan pada model adalah Heteroskedastisitas. Untuk melakukan pengujian terhadap masalah heteroskedastisitas digunakan *Heteroscedasticity test* yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Prob.>	
Chi2	0,00

**Sumber:** Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 dengan nilai Prob>Chi2 sebesar  $0,00 < 0,05$ . Sesuai dengan ketentuan maka menolak  $H_0$ , yang berarti pada model ini terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji selanjutnya yang perlu dilakukan pada data panel adalah Uji Autokorelasi. Uji ini perlu dilakukan karena pada data panel sering terjadi Autokorelasi. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

$H_0$ :	no first-order autocorrelation
F (1, 10)	= 27,56
Prob > F =	0,00

**Tabel 7** Hasil Uji Autokorelasi

**Sumber:** Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji autokorelasi pada model, Prob > F =  $0,00 < 0,05$  yang berarti tolak  $H_0$ .

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model terjadi Autokorelasi. Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan pada model, maka dinyatakan bahwa model terkena masalah Autokorelasi dan Heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah tersebut pada model, maka metode yang digunakan adalah

metode *Panel Corrected Standard Errors* (PCSEs). Metode ini sangat relevan untuk model yang memiliki masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi yang memiliki jumlah  $N > T$ . Berdasarkan hasil regresi dengan metode PCSEs, maka hasil estimasi dari model terpilih dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

**Tabel 8** Hasil Estimasi untuk Melihat Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jambi

Linear regression, correlated panels corrected standard errors (PCSEs)

Group variable:	id	Number of obs	=	55	
Time variable:	t	Number of groups	=	11	
Panel:	correlated (balanced)	Obs per group: min	=	5	
Autocorrelation:	no autocorrelation	avg	=	5	
		max	=	5	
Estimated covariances	=	66	R-squared	=	0.4966
Estimated autocorrelations	=	0	wald chi2(3)	=	4083.35
Estimated coefficients	=	4	Prob > chi2	=	0.0000

iw	Panel-corrected		z	P> z	[95% Conf. Interval]	
	Coef.	Std. Err.				
ipm	-.0070722	.001284	-5.51	0.000	-.0095887	-.0045556
lpdrb	.2311841	.0183134	12.62	0.000	.1952905	.2670776
lpad	-.0276684	.0237689	-1.16	0.244	-.0742545	.0189178
_cons	-2.108551	.1214709	-17.36	0.000	-2.346629	-1.870472

**Sumber :** Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 dengan nilai  $R^2$  sebesar 0,496, dapat diinterpretasikan bahwa variasi dari perubahan nilai variabel ketimpangan ekonomi (IW) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel bebas sebesar 49,6 % *ceteris paribus* sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel bebas lain diluar model.

Uji terhadap hipotesis perlu dilakukan untuk menjawab tujuan dari

penelitian. Nilai Probability >chi2 = 0,0000 <  $\alpha = 0,05$ , sehingga menolak  $H_0$  yang berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yakni ketimpangan ekonomi, sehingga model ketimpangan ekonomi ini dapat digunakan.

Uji secara parsial terhadap variabel bebas juga dilakukan terhadap model dimana variabel IPM dan

LPDRB signifikan mempengaruhi ketimpangan ekonomi yang ditandai dari nilai probabilitasnya tidak ada yang besar dari nilai kritis 1%, sedangkan variabel PAD tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa peningkatan Variabel IPM memiliki koefisien -0,007 yang berarti memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap IW. Peningkatan IPM sebesar 1 (satu) satuan akan mereduksi ketimpangan wilayah (IW) sebesar 0,007 satuan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Nurhuda, et al (2013) yang menemukan bahwa peningkatan IPM dapat menurunkan ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Zusanti, et al (2020) yang menggunakan metode Random Effect Model (REM) terhadap Provinsi yang ada di Pulau Jawa periode 2010-2018 menyimpulkan bahwa IPM memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa.

Hasil ini juga mendukung teori Endogen yang menyatakan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternal positif) dan meningkatkan produktifitas yang mampu mengimbangi kecendrungan penurunan skala hasil, yang selanjutnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memberikan *spread effect* terhadap daerah-daerah sekitarnya yang pada akhirnya dapat mereduksi ketimpangan ekonomi.

Variabel LPDRB memiliki koefisien 0,23 yang berarti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Ketimpangan wilayah (IW). Peningkatan PDRB sebesar 1 (satu) satuan akan berpengaruh terhadap peningkatan Ketimpangan wilayah (IW) sebesar 0,23 satuan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Bahmani-Oskooee et.al (2008) bahwa dalam jangka pendek PDRB akan meningkatkan Ketimpangan wilayah sedangkan dalam jangka panjang akan mereduksi ketimpangan wilayah. Variabel PAD tidak signifikan



mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa IPM signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah yakni IPM dapat menurunkan tingkat ketimpangan wilayah dimana peningkatan IPM sebesar 1 (satu) satuan akan mereduksi ketimpangan wilayah (IW) sebesar 0,007 satuan.

## SARAN

Dilihat dari nilai Indeks Williamson, ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi termasuk dalam kategori yang rendah, namun peningkatan IPM secara signifikan akan semakin memperkecil ketimpangan antar wilayah tersebut. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan serta program kegiatan yang *output* dan *outcome*-nya yang mengarah pada peningkatan IPM perlu menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Berita Resmi Statistik mengenai IPM Provinsi Jambi 2020, IPM Provinsi Jambi mengalami tren yang terus meningkat namun

mengalami perlambatan pada Tahun 2020. Indeks komponen Kesehatan dan Pengetahuan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hanya indeks komponen standar hidup yang layak (*dicapture* dari pengeluaran perkapita yang disesuaikan) mengalami penurunan sebesar Rp 200.000,-dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Tindakan Pemerintah yang cepat tanggap serta nyata terhadap upaya untuk menanggulangi dan meminimalisir dampak pandemi Covid 19 terhadap perekonomian masyarakat amatlah dibutuhkan segera, agar berdampak pada peningkatan IPM yang merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

Alexiou, C. (2009) 'Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE).', *Journal of Economic and Social Research*.

Bahmani-Oskooee, Mohsen, Hegerty, Scott W, W. H. (2008) 'Short Run and Long Run Determinants of Income Inequality: Evidence from 16 Countries. *Journal of Post Keynesian Economics*', *Journal of Post Keynesian Economics*, Vol. 30.

Beck, N. and Katz., J. N. (1995) 'What

- to Do (and Not to Do) with Time Series Cross Section Data.', *American Political Science Review*.
- BPS (2015) *IPM Badan Pusat Statistik*. Jakarta.
- BPS (2018) *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2018*. BPS.
- BPS (2019) *Berita Resmi Statistik*. 026/5/15/T. Jakarta.
- BPS (2020) *Februari 2019 :Tingkat pengangguran terbuka 3,62*. Available at: <https://jambi.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/367/>.
- Budiantara and Sugiantari (2013) 'Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semi Parametrik Spline.', *Jurnal sains dan Seni Pomits*, Vol. 2.
- Chatterjee, Santanu, and S. J. T. (2012) 'Infrastructure and Inequality', *European Economic Review*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2012.08.003>.
- Frank, R. H., & Bernanke, B. S. (2007) *Principles of Microeconomics (3rd ed.)*. New York: McGraw-Hill/Irwin. 3rd edn. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Junaidi, H. dan (2011) 'Analisis Kuantitas dan Kualitas Penduduk sebagai Modal Dasar dan Orientasi Pembangunan di Provinsi Jambi'.
- Melliana, Aynanda and Ismaini.Zain (2013) 'Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Regresi Panel', *Jurnal sains dan seni pomits*, 2.
- Rahmayanti, Y. and Theara, H. (2010) "Expenditure Efficiency and the Optimal Size of Government in Developing Countries.", *Public Policy* 07–12: 19.
- Sebayang. Putri (2016) 'putri suryani sebayang - UNIMED'.
- Sen, A. 1999. (1999) *Development as freedom 1st ed*. New York: Oxford University Pres.
- Sjafrizal (1997) *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma, LP3ES.
- Spangenberg (2015) 'The Corporate Human Development Index CHDI', *Journal of Cleaner Production*., xxx.
- Todaro, M. P. 2000. (2000) *Economic Development*., Seventh Ed. New York: University Addison Mesley.
- Wibowo, K. (2003) *Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Kerangka Teoritis Dan Aplikasinya*. Modul 1.
- Williamson, J. G. 1965. (1965) 'Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns', *Economic Development and Cultural Change*., doi: <https://doi.org/10.1086/450136>.

Winarno, W. W. (2015) *Analisa  
Ekonometrikadan Statistika  
dengan Eviews.* empat.  
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Woodhall.M. Psacharopoulos. G (1985)  
*Education for Development.*  
USA: Oxford Universiti, Press.

Zusanti, RD, Hadi Sasana, Rusmijati  
Rusmijati. 2020. Analisis  
Pengaruh IPM , Pertumbuahn  
Ekonomi dan TPT terhadap  
Ketimpangan Wilayah di Pulau  
Jawa 2010-2018. *Dinamic :*  
*Directory Journal of Economic.*  
Vol 2, No 3